

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TRANSPARANSI ANGGARAN BERBASIS WEBSITE: STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Siti Mutma'innah<sup>1</sup>, Wahyudin Nor<sup>2</sup>, Monica Rahardian Ary Helmina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sari Mulia, Banjarmasin, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Email: [siti.mutmainnah@unism.ac.id](mailto:siti.mutmainnah@unism.ac.id)

### Abstrak

Transparansi anggaran berbasis *website* pemerintah provinsi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola yang akuntabel. Namun, tingkat keterbukaan antar provinsi masih bervariasi. Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja daerah, media coverage, dan tingkat kesejahteraan masyarakat (PDRB) terhadap transparansi anggaran berbasis website, serta menilai peran tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan data 34 provinsi selama 2014-2023 (340 observasi) dan dianalisis dengan Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media coverage dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap transparansi anggaran digital, sedangkan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan. TIK terbukti memperkuat pengaruh *media coverage*, namun tidak memoderasi pengaruh belanja daerah maupun PDRB. Temuan ini menegaskan bahwa infrastruktur teknologi tidak otomatis meningkatkan transparansi, karena keberhasilan transparansi digital bergantung pada komitmen organisasi, kesiapan SDM, dan budaya birokrasi.

**Kata Kunci:** Transparansi Anggaran, *Website* Pemerintah, *Media Coverage*, PDRB, Teknologi Informasi.

### Abstract

*Website-based budget transparency for provincial governments is a crucial component of efforts to achieve accountable governance. However, the level of transparency varies across provinces. This study analyzes the influence of regional spending, media coverage, and the level of public welfare (GRDP) on website-based budget transparency, and assesses the role of information and communication technology (ICT) development as a moderating variable. The study used data from 34 provinces from 2014 to 2023 (340 observations) and analyzed using Partial Least Squares (PLS). The results show that media coverage and GRDP significantly influence digital budget transparency, while regional spending has no significant effect. ICT is shown to strengthen the influence of media coverage, but does not moderate the effects of regional spending or GRDP. These findings confirm that technological infrastructure does not automatically increase transparency, as the success of digital transparency depends on organizational commitment, human resource readiness, and bureaucratic culture.*

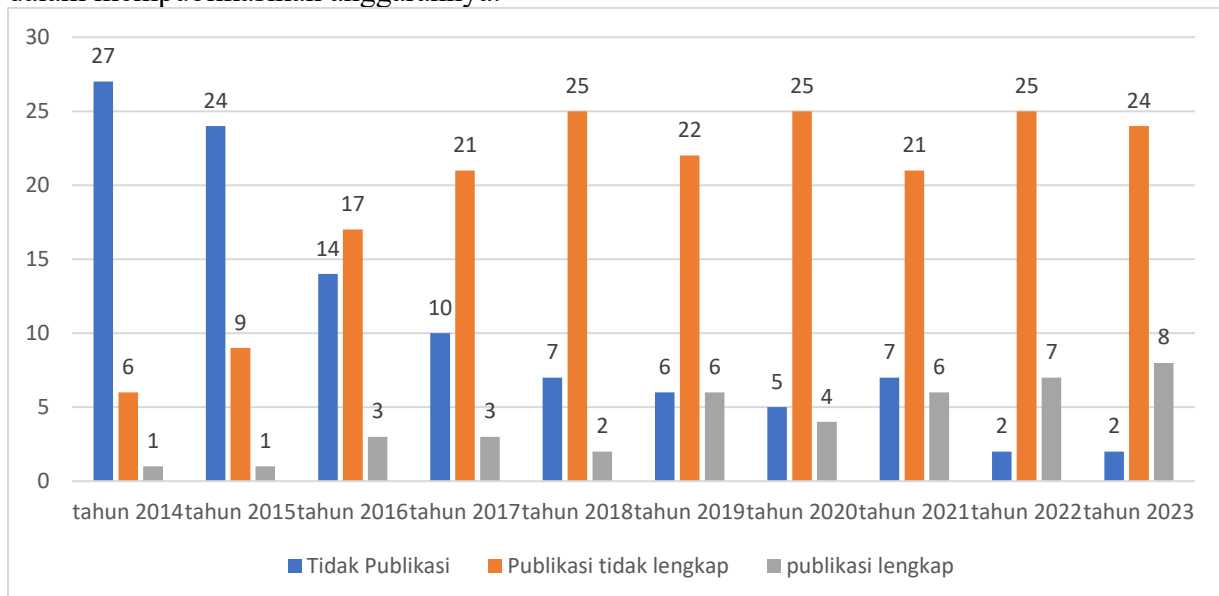
**Keywords:** Budget Transparency, Government Website, Media Coverage, GRDP, Information Technology.

### A. PENDAHULUAN

Transparansi anggaran merupakan elemen penting dari tata kelola pemerintahan yang efektif. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pemerintah wajib untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan

kelas. Hal ini diperkuat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD), yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan informasi terkait dokumen anggaran melalui *website* resmi (Mutmainnah et al., 2023). Implementasi kebijakan bertujuan untuk meminimalkan asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, sebagaimana dijelaskan dalam *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976).

Klun et al., (2019) menyatakan bahwa transparansi anggaran memberikan peluang kepada publik untuk memengaruhi keputusan tentang pendapatan, pengeluaran serta belanja pemerintah. Oleh karena itu anggaran pemerintah daerah yang telah disusun harus dipublikasikan melalui kanal *website* secara tepat waktu (Mourao et al., 2020; Ott, Bronić, et al., 2019). Faktanya, tingkat transparansi anggaran berbasis situs web sangat bervariasi antarprovinsi di Indonesia. Beberapa provinsi telah konsisten memperbarui dokumen anggaran secara komprehensif dan mudah diakses, sementara provinsi lain justru masih terbatas dalam menyediakan informasi yang memadai (Mutmainnah et al., 2023; Nor et al., 2021). Berdasarkan pengamatan awal pada Gambar 1, jumlah dokumen anggaran yang dipublikasikan telah meningkat selama dekade 2014 hingga 2023. Akan tetapi tidak semua provinsi lengkap dalam mempublikasikan anggarannya.



**Gambar 1. Tingkat Publikasi Anggaran Melalui *Website* Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2023**

Beberapa provinsi telah menggunakan situs web mereka untuk menyediakan dokumen APBD yang terperinci dan mudah diakses, sementara sebagian lainnya masih terbatas pada publikasi ringkasan atau dokumen dalam format yang tidak terstruktur, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai berbagai variabel yang memengaruhi transparansi anggaran disitus web pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini akan melanjutkan sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi faktor internal seperti kapasitas fiskal atau belanja daerah sebagai determinan transparansi anggaran (Alhajjriana et al., 2018; Mutmainnah et al., 2023; Nor et al., 2021). Provinsi dengan anggaran belanja yang besar cenderung untuk mengalokasikan sumber daya pada pengembangan sistem informasi digital, termasuk pengembangan *website* untuk publikasi anggaran.

Faktor eksternal, seperti *media coverage*, juga terbukti memberikan tekanan bagi pemerintah untuk lebih transparan dalam menyajikan informasi anggaran kepada publik (Rukavina, 2023). Selain itu, aspek sosiodemografi seperti tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari besaran pendapatan perkapita (PDRB) berhubungan dengan meningkatnya

tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi (Ott, Bronic, et al., 2019). Kebutuhan yang kuat akan pelayanan, mendorong pemerintah untuk memberikan layanan terbaik yakni dengan transparansi informasi yang lebih baik pada *website* pemerintah (Mutmainnah et al., 2023).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas faktor-faktor tersebut, masih terdapat *research gap* yang perlu diisi. Pertama, penelitian tentang peran teknologi informasi (TIK) sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor fiskal, sosial, media, dan transparansi anggaran masih terbatas, khususnya pada konteks Indonesia. Kedua, kajian *Digital Transformation Theory* dalam penelitian terkait sektor publik masih jarang dibahas. Tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengadopsi transparansi berbasis *website* (Ciancarini et al., 2024).

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transparansi anggaran pada situs web pemerintah provinsi di Indonesia dari tahun 2014–2023. Variabel independen yang dianalisis mencakup belanja daerah, media coverage dan tingkat kesejahteraan masyarakat, sementara tingkat pembangunan TIK diuji sebagai variabel moderasi. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan *Agency Theory* dan *Digital Transformation Theory* serta dapat memperkaya kajian mengenai Transparansi Anggaran berbasis *website* pada sektor publik. Pada tingkatan praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam dalam inisiatif mereka untuk meningkatkan transparansi anggaran sehingga diharapkan pemerintah daerah di Indonesia mampu menyajikan APBD yang lebih berkualitas serta memiliki nilai guna yang tinggi bagi masyarakat, serta kontribusi praktis bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi anggaran di era digital.

## B. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 1. Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) bahwa teori keagenan melibatkan kesepakatan dua pihak, yaitu hubungan yang timbul ketika satu pihak (prinsipal) memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (agen) untuk mengambil keputusan. Terkait transparansi, teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemerintah, sebagai agen, dan publik sebagai prinsipal. Teori ini muncul untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul ketika pemerintah memberikan informasi yang tidak lengkap kepada publik. Ketika masyarakat meningkatkan pengawasan dan mengumpulkan informasi yang relevan dari pemerintah, kesenjangan informasi dapat dikurangi (Adriana & Ritonga, 2018). Di sisi lain, perbedaan peran ini dapat menimbulkan masalah keagenan, khususnya mempertanyakan apakah tindakan atau kebijakan yang diberlakukan oleh agen benar-benar berfokus pada peningkatan kesejahteraan prinsipal, atau apakah tindakan atau kebijakan tersebut terutama melayani kepentingan agen.

Untuk mengurangi perselisihan ini, prinsipal harus mematuhi berbagai aktivitas atau aturan yang ditetapkan oleh agen, yang menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan ini akan meningkat jika prinsipal kesulitan mengawasi agen secara efektif. Biaya yang berkaitan dengan keagenan akan meningkat jika prinsipal memiliki lebih banyak kesulitan dalam mengawasi agen. Oleh karena itu, kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang pemerintah seperti publikasi anggaran melalui *website* dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah merupakan salah satu contoh cara untuk mengurangi timbulnya konflik keagenan tersebut. Berkurangnya konflik keagenan dengan sendirinya mengurangi besarnya *agency cost* yang mesti ditanggung oleh principal.

### 2. Teori Transformasi Digital Sektor Publik

Teori Transformasi digital dalam sektor publik umumnya masih berlandaskan pada pandangan determinisme teknologi, yaitu keyakinan bahwa penggunaan teknologi digital dan

proses digitalisasi otomatis akan meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kemampuan organisasi untuk beradaptasi, serta membawa berbagai dampak positif seperti efisiensi biaya, kontribusi bagi masyarakat, dan penguatan nilai-nilai demokrasi (Mergel et al., 2019). Berdasarkan teori tersebut transformasi digital pada organisasi sektor publik akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan pula transparansi kepada publik.

### **3. Transparansi Anggaran Berbasis Website**

Transparansi anggaran merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Menurut Kasymova et al., (2016) transparansi anggaran adalah informasi anggaran suatu daerah yang disediakan secara terbuka serta dapat diakses dalam rangka meminimalisir asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Pada konteks digital, Citro et al., (2021) menegaskan bahwa kanal web pemerintah merupakan sarana strategis dalam menyebarkan informasi anggaran karena memungkinkan akses yang cepat, luas, dan efisien. Penelitian terdahulu menemukan bahwa tidak semua provinsi konsisten dalam mengunggah dokumen APBD, sehingga terjadi kesenjangan transparansi antar provinsi (Mutmainnah et al., 2023; Nor et al., 2021).

### **4. Belanja Daerah Memiliki Pengaruh Terhadap Transparansi Anggaran berbasis Website**

Sebagaimana tercantum dalam No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan” (Republik Indonesia, 2004). Kewajiban pemerintah daerah terhadap warganya mencakup penyediaan layanan publik yang berkualitas melalui anggaran daerah (Pratama et al., 2015). Hal ini dicapai dengan meningkatkan layanan esensial, pendidikan, memastikan kecukupan fasilitas kesehatan, layanan sosial, dan fasilitas umum, serta membangun kerangka kerja jaminan sosial (Rozi, 2018). Menurut teori keagenan, konteks ini memotivasi pemerintah untuk lebih terbuka terkait informasi pengelolaan anggaran guna menegakkan akuntabilitas (Jensen & Meckling, 1976). Alhajjriana et al., (2018) dan Pratama et al., (2015) mengemukakan bahwa belanja daerah memengaruhi pembagian informasi keuangan secara *online*. Dari penjelasan tersebut, hipotesis awal yang diajukan adalah:

H<sub>1</sub>: Belanja Daerah memiliki pengaruh terhadap Transparansi Anggaran berbasis situs web pemerintah Provinsi di Indonesia.

### **5. Pengaruh Media Coverage Terhadap Transparansi Anggaran berbasis Website**

*Media coverage* dapat diartikan sebagai pemberitaan oleh media, baik media cetak, elektronik, maupun daring yang menyoroti informasi terkait anggaran publik serta laporan keuangan pemerintah (Zhang & Zheng, 2017). Peran utama media coverage adalah menyebarkan informasi kepada masyarakat sekaligus mendorong akuntabilitas pemerintah melalui tekanan publik dan reputasi, sehingga pemerintah terdorong untuk menyajikan informasi anggaran yang lebih transparan, lengkap, dan mudah diakses (Rukavina, 2023). Dalam perspektif *agency theory*, media berfungsi sebagai pengawas independen yang memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel. Penelitian Laswad et al., (2005) memperkuat hubungan ini dengan temuan bahwa media coverage berpengaruh positif terhadap transparansi fiskal pemerintah daerah. Dengan meningkatnya pemberitaan media, asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat berkurang, sehingga fungsi pengawasan publik dapat berjalan lebih efektif.

H<sub>2</sub>: Media Coverage berpengaruh terhadap Transparansi Anggaran berbasis website pemerintah Provinsi di Indonesia.

## **6. Pengaruh tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Transparansi Anggaran Berbasis *Website***

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diamati dari besarnya PDRB per kapita suatu daerah, diyakini berhubungan erat dengan permintaan publik terhadap transparansi. Styles & Tennyson, (2007) menyebutkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita mengakibatkan peningkatan pengawasan dari entitas politik dan publik, sehingga meningkatkan permintaan informasi yang tersedia bagi warga negara.

Secara sederhana, masyarakat yang lebih kaya cenderung lebih berfokus pada tindakan pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kebutuhan akan ketersediaan informasi daerah, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Nainggolan & Purwanti, 2017). Berdasarkan teori agensi, hal ini mendorong pemerintah untuk menjunjung tinggi transparansi dalam rangka mempertahankan tanggungjawabnya kepada masyarakat karena berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sutaryo & Tri Amanu, (2020) menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan memengaruhi transparansi informasi keuangan pada platform web pemerintah daerah.

H<sub>3</sub>: Tingkat Kesejahteraan Masyarakat memiliki pengaruh terhadap Transparansi Anggaran berbasis website pemerintah Provinsi di Indonesia.

## **7. Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Pemoderasi Dalam Hubungan Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Transparansi Anggaran Berbasis Website Pemerintah Provinsi di Indonesia.**

Besarnya belanja daerah seringkali meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga menimbulkan masalah keagenan antara pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal. Kondisi seperti ini mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi pengelolaan anggaran agar akuntabilitasnya tetap terjaga. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih komprehensif dalam menyajikan transparansi anggaran belanja daerah melalui situs web pemerintah provinsi di Indonesia.

H<sub>4</sub>: Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap Transparansi Anggaran berbasis *website* pemerintah Provinsi di Indonesia.

## **8. Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Pemoderasi Dalam Hubungan Pengaruh Media Coverage Terhadap Transparansi Anggaran Berbasis Website Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Media berperan dalam meliput isu-isu publik yang dapat meningkatkan tekanan politik bagi pemerintah. Usaha pemerintah dalam mengurangi biaya politik dan mendorong keterbukaan informasi publik adalah dengan membangun persepsi baik publik terhadap transparansi anggaran melalui media coverage. Semakin tinggi sorotan media (media coverage), semakin besar kecenderungan pemerintah provinsi untuk membuka informasi anggaran secara digital. Oleh karena itu, Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi harus terus ditingkatkan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan media maupun website sebagai penunjang kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi anggaran pemerintah.

H<sub>5</sub>: Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi memoderasi pengaruh *Media Coverage* terhadap Transparansi Anggaran berbasis *website* pemerintah Provinsi di Indonesia.

### 9. Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Pemoderasi dalam Hubungan Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Transparansi Anggaran Berbasis Website Pemerintah Provinsi di Indonesia

Peningkatan kesejahteraan masyarakat mencerminkan kemampuan ekonomi dan pendidikan warga yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran serta tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi, termasuk informasi mengenai pengelolaan anggaran daerah. Namun, pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap transparansi anggaran digital tidak selalu sama pada setiap wilayah. Faktor yang membedakannya adalah tingkat pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di masing-masing provinsi.

Daerah dengan infrastruktur dan pemanfaatan TIK yang lebih maju memiliki kapasitas lebih besar untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui platform digital, sehingga transparansi anggaran berbasis website dapat terwujud dengan lebih efektif. Sebaliknya, pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan TIK, keterbukaan informasi publik cenderung terhambat meskipun tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi. Dengan demikian, pembangunan TIK berfungsi sebagai variabel pemoderasi yang meningkatkan atau mengurangi hubungan antara kesejahteraan masyarakat dan transparansi anggaran berbasis website pemerintah daerah.

H<sub>6</sub>: Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi memoderasi pengaruh Tingkat Kesejahteraan Masyarakat terhadap Transparansi Anggaran berbasis website pemerintah Provinsi di Indonesia.

### C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan bertujuan untuk mengkaji serta mengevaluasi pengaruh Belanja Daerah (X1), *Media Coverage* (X2), dan Tingkat kesejahteraan Masyarakat (X3) terhadap Transparansi Anggaran berbasis website pemerintah provinsi di Indonesia (Y). Penelitian ini mencakup pemeriksaan variabel moderasi, yaitu Tingkat Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Z). Informasi yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dari situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Google News yang mencakup jangka waktu dari tahun 2014 hingga 2023. Data tentang Transparansi Anggaran diperoleh dengan mengakses website resmi pemerintah provinsi dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis dokumen anggaran. Data variabel belanja daerah diambil dari dokumen Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi oleh BPS. Data Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang diprosikan dengan PDRB perkapita diperoleh melalui data statistik PDRB per provinsi oleh BPS. Adapun data Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai variabel moderasi diperoleh dari data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang bersumber dari BPS. Populasi untuk penelitian ini mencakup semua 34 pemerintah provinsi di seluruh Indonesia..

**Tabel 1. Definisi Operasionalisasi Variabel Dependen, Variabel Independen dan Variabel Moderasi**

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Transaparansi Anggaran berbasis website Pemerintah Provinsi di Indonesia (Y)	Ketersediaan Dokumen Anggaran pada website resmi pemerintah provinsi pada laman TPAD sesuai Instruksi Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 (Mutmainnah et al., 2023; Sutaryo & Tri Amanu, 2020; Syamsul, 2020)	Transaparansi Anggaran diukur menggunakan skala interval. Skala ini merupakan bentuk pengukuran yang mengidentifikasi urutan, variasi, dan kemiripan dalam variasi variabel (Sekaran & Bougie, 2017).

## ARTIKEL

		Skala Pengukuran sebagai berikut : 1: Tidak mempublikasikan dokumen anggaran pada situs web 2: publikasi 1-3 dokumen Anggaran 3: publikasi 4-6 dokumen Anggaran 4: publikasi 7-9 dokumen Anggaran 5: publikasi 10-12 dokumen
Belanja Daerah (X1)	Variabel belanja daerah dikuantifikasi menggunakan logaritma natural (Ln) dari total belanja daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran(Nor et al., 2021)	Ln Total Belanja daerah
Media Coverage(X2)	Variabel <i>Media coverage</i> ditentukan dengan menghitung jumlah artikel berita mengenai anggaran pemerintah provinsi yang ditampilkan di Google News(Laswad et al., 2005; Rukavina, 2023).	Ln Jumlah berita terkait “APBD/anggaran provinsi” per tahun per provinsi. Data: GNews API / Google News.
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (X3)	Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dinilai melalui pendapatan per kapita suatu daerah(Rahim & Martani, 2016; Styles & Tennyson, 2007)	Ln Total PDRB
Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi (Z)	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi (BPS, 2020)	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi (Chen et al., 2019; Mutmainnah et al., 2023)

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Data yang telah diperoleh tersebut akan dianalisis dan diproses dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS). Mengingat kemungkinan distribusi data sumber yang tidak normal, yang ditunjukkan oleh beragamnya distribusi data transparansi anggaran yang terdapat di situs web Pemerintah Provinsi (Gambar 1), teknik PLS dipilih sebagai pendekatan analisis sekunder. Pendekatan PLS ini mencakup penilaian kesesuaian model yang didasarkan pada 10 indeks kesesuaian yang berbeda. Selanjutnya, data akan dievaluasi menggunakan model regresi yang direpresentasikan oleh model persamaan regresi berikut:

$$\text{Model Persamaan Regresi 1 : } Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$\text{Model Persamaan Regresi 2 : } Y = \alpha + \beta_1 X_1 Z + \beta_2 X_2 Z + \beta_3 X_3 Z + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Tingkat Transparansi Anggaran berbasis *website* Pemerintah Provinsi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

X1 = Belanja Daerah

X2 = Media Coverage

X3 = Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Z = Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi

$\varepsilon$  = regression error

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dimana populasi dan sampel seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia selama periode 2014-2023. Data yang terkumpul sebanyak 340 data dari setiap variabel. Pada tabel 2 dijelaskan tingkat Transparansi anggaran berbasis website Pemerintah provinsi di Indonesia dari skala 1-5.

**Tabel 2. Tingkat Transparansi Anggaran Berbasis Website Pemerintah Provinsi**

Kriteria Pengukuran	Skala	Jumlah
Tidak Ada Publikasi Anggaran	1	104
Publikasi 1-3 Dokumen	2	79
Publikasi 4-6 Dokumen	3	67
Publikasi 7-9 Dokumen	4	32
Publikasi 10-12 Dokumen	5	58
<b>Total</b>		<b>340</b>

Sumber: Data diolah (2025)

Pada tabel 3 berikut disajikan nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi masing-masing variabel.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Independen dan Variabel Moderating**

	N	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
BLD (X1)	340	1.564.153	1.552.000	1.337.000	1.819.000	84.943
MEDC(X2)	340	665.015	700.000	110.000	1.023.000	179.382
PDRB (X3)	340	1.228.412	1.210.000	1.009.000	1.505.000	115.743
IPTIK (Z)	340	514.450	522.000	0	925.000	106.746
TPAD(Y)	340	2.647	2	1	5	1.451

Sumber: Output PLS 3.0 (2025)

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan dasar pengambilan keputusan dengan perbandingan nilai P Value dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hipotesis penelitian akan diterima Jika nilai P-value  $< 0,05$ , disisi lain hipotesis penelitian akan ditolak, jika P-value  $> 0,05$ . Tabel 4 berikut disajikan hasil uji signifikansi melalui analisis PLS.

**Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Pengaruh**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
BLD(X1) -> TPAD (Y)	0,053	0,057	0,100	0,534	0,594
BLD(X1) *IPTIK(Z) -> TPAD (Y)	-0,108	-0,111	0,065	1,672	0,095
IPTIK(Z) -> TPAD (Y)	0,124	0,127	0,054	2,298	0,022
Media Cov(X2) -> TPAD (Y)	0,190	0,190	0,056	3,389	0,001
Media Cov(X2) *IPTIK(Z) -> TPAD (Y)	0,150	0,143	0,049	3,035	0,003
PDRB(X3) -> TPAD (Y)	0,383	0,376	0,098	3,929	0,000
PDRB(X3) *IPTIK(Z) -> TPAD (Y)	-0,075	-0,073	0,085	0,883	0,378

Sumber: Output PLS 3.0 (2025)

### **Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Transparansi Anggaran berbasis Website Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Hasil analisis mengenai pengaruh belanja daerah (X1) terhadap Transparansi Anggaran berbasis Website Pemerintah Provinsi di Indonesia menunjukkan nilai koefisien 0,053 dan nilai P-value sebesar 0,594 lebih tinggi dari 0,05. Hasil ini menginterpretasikan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi anggaran berbasis situs web pemerintah Provinsi di Indonesia, yang mengarah pada penolakan hipotesis pertama (H1). Temuan ini sejalan dengan penelitian Nor et al., (2021) juga menemukan bahwa belanja daerah tidak memengaruhi transparansi anggaran pada situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia. Demikian pula, penelitian oleh Astuti (2020) dan Nainggolan & Purwanti (2017) mendukung klaim ini, mencatat bahwa belanja daerah tidak berdampak signifikan terhadap transparansi data keuangan daerah yang disajikan secara online. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil Pratama et al., (2015) Alhajjriana et al., (2018); Wilopo, (2017) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap transparansi melalui *website*.

Adanya perbedaan hasil dengan penelitian terdahulu dikarenakan data yang tersebar dan tidak konsisten. Sebagian provinsi yang memiliki belanja daerah yang besar memiliki nilai tingkat transparansi anggaran berbasis website yang rendah, namun beberapa diantaranya memiliki tingkat nilai tingkat transparansi anggaran yang tinggi seperti Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Pada konteks teori agensi pemerintah sebagai agen akan berusaha bertanggungjawab atas anggaran belanja agar lebih transparan dalam pengelolaannya. Kemudian bentuk pertanggungjawabannya pemerintah harus mengungkapkan secara memadai mengenai informasi anggaran pemerintah daerah sesuai standar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui website resmi pemerintah.

### **Pengaruh Media Coverage Terhadap Transparansi Anggaran berbasis Website**

Pengaruh *media coverage* (X2) terhadap Transparansi Anggaran berbasis Website Pemerintah Provinsi di Indonesia memiliki koefisien sebesar 0,190 dan nilai-P sebesar 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan *media coverage* berdampak signifikan terhadap Transparansi Anggaran berbasis Website Pemerintah Provinsi di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang diajukan terbukti. Peningkatan *media coverage* akan memotivasi pemerintah untuk menyediakan informasi anggaran yang lebih transparan, komprehensif, dan mudah diakses (Rukavina, 2023). Dalam perspektif agency theory, media berfungsi sebagai pengawas independen yang memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel. Laswad et al., (2005) dan (Rukavina, 2023) memperkuat hubungan ini dengan temuan bahwa *media coverage* berpengaruh positif terhadap transparansi fiskal pemerintah daerah. Dengan meningkatnya pemberitaan media, asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat berkurang, sehingga fungsi pengawasan publik dapat berjalan lebih efektif. Berbeda hasil penelitian Afryansyah (2013); García & García-García, (2010) yang mengemukakan *media coverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan informasi melalui *website*.

### **Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Tingkat Transparansi Anggaran Melalui Website Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki koefisien 0,383 dan nilai P-value sebesar 0,000 dibawah dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan memiliki pengaruh yang substansial terhadap transparansi informasi anggaran melalui situs web di pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, sehingga mengonfirmasi hipotesis ketiga (H3). Menurut Styles & Tennyson, (2007) pendapatan per kapita yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan pengawasan politik dan publik, yang meningkatkan tuntutan transparansi informasi publik.

Masyarakat yang lebih makmur akan lebih memperhatikan tindakan pemerintah daerah, sehingga pengungkapan informasi daerah seharusnya sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.(Nainggolan & Purwanti, 2017). Berdasarkan teori agensi , hal ini menjadi motivasi pemerintah untuk melakukan transparansi dalam rangka mempertahankan tanggungjawabnya kepada masyarakat karena berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sutaryo & Tri Amanu, (2020) menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan melalui website pemerintah daerah.

### **Pengaruh Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Memoderasi Hubungan Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Transparansi Anggaran Berbasis Website Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Pada hasil pengujian pengaruh Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam memoderasi hubungan Belanja Daerah (X1) terhadap Transparansi Anggaran berbasis situs web pemerintah Provinsi di Indonesia(Y) diperoleh nilai koefisien - 0,108 Hal ini menunjukkan adanya korelasi negatif antara dampak Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Z) terhadap pengaruh Belanja Daerah (X1) terhadap Transparansi Anggaran pada situs web Pemerintah Provinsi di Indonesia (Y). Selain itu, temuan ini didukung oleh tingkat signifikansi sebesar 0,095 yang lebih tinggi dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Z) tidak memengaruhi hubungan antara Belanja Daerah (X1) dan Transparansi Anggaran menurut situs web Pemerintah Provinsi di Indonesia (Y). Oleh karena itu hipotesis ke empat (H4) yang diajukan ditolak.

Hal ini ditunjukkan dari dari 152 data yang memiliki belanja daerah tinggi (> 5 Trilyun) dengan Indeks Pembangunan TIK yang tinggi hanya 49 diantaranya yang memiliki tingkat Transparansi Anggaran berbasis website pada skala 5 dan 23 yang memiliki tingkat Transparansi Anggaran berbasis website pada skala 4 dan selebihnya tidak lengkap dalam Transparansi Anggaran berbasis website . Data pada tabel 5 disajikan perbandingan Pengaruh Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam memoderasi hubungan pengaruh belanja daerah terhadap Transparansi Anggaran berbasis website pemerintah Provinsi di Indonesia.

**Tabel 5. Distribusi Data Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komuniaksi dalam Memoderasi Belanja Daerah Terhadap Transparansi Anggaran Berbasis Situs Website Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belanja Daerah	Skala TPAD					Jumlah	Total
		1	2	3	4	5		
Sangat rendah (IPTIK<3.61)	<500 Milyar	0	0	0	0	0	0	23
	>500 Milyar-1 Trilyun	1	0	0	0	0	1	
	>1 Trilyun-5 Trilyun	4	2	3	0	0	9	
	>5 Trilyun	5	6	2	0	0	13	
Rendah (3.61<=IPTIK<3.97)	<500 Milyar	0	0	0	0	0	0	27
	>500 Milyar-1 Trilyun	0	0	0	0	0	0	
	>1 Trilyun-5 Trilyun	13	6	2	0	0	21	
	>5 Trilyun	1	3	1	1	0	6	
Sedang (3.97<=IPTIK<4.49)	<500 Milyar	0	0	0	0	0	0	44
	>500 Milyar-1 Trilyun	0	0	0	0	0	0	
	>1 Trilyun-5 Trilyun	15	4	2	0	1	22	
	>5 Trilyun	6	8	4	1	3	22	
Tinggi (IPTIK>=4.49)	<500 Milyar	0	0	0	0	0	0	246
	>500 Milyar-1 Trilyun	0	0	0	0	0	0	
	>1 Trilyun-5 Trilyun	35	24	18	6	11	94	
	>5 Trilyun	16	34	30	23	49	152	

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Hasil pengujian pada table 5 ditemukan bahwa pengaruh moderasi yang rendah dari pengaruh Belanja Daerah terhadap Transparansi Anggaran berbasis website pemerintah Provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan besarnya belanja daerah yang dinamis dengan tingkat Pembangunan TIK yang tinggi tidak memberikan jaminan transparansi anggarannya semakin tinggi. Prioritas belanja daerah bisa jadi dialokasikan pada sektor lain yang lebih berdampak pada pemenuhan kebutuhan utama masyarakat, disisi lain perlunya komitmen yang kuat pemerintah daerah dalam implementasi transparansi anggaran.

### **Pengaruh Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Memoderasi Hubungan Pengaruh Media Coverage Terhadap Transparansi Anggaran Berbasis Website Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Temuan mengenai variabel Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi(Z) dalam memoderasi hubungan pengaruh Media Coverage(X2) terhadap Transparansi Anggaran berbasis website pemerintah Provinsi di Indonesia (Y) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,150 dan nilai p sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa faktor TIK (Z) berperan penting dalam memoderasi dampak langsung Media Coverage (X2) terhadap Transparansi Anggaran pada situs web Pemerintah Provinsi di Indonesia (Y). Dengan demikian, hipotesis 5 (H5) yang diajukan terdukung.

**Tabel 6. Distribusi Data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komuniaksi dalam Memoderasi Media Coverage Terhadap Transparansi Anggaran Berbasis Website Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi	Media Coverage	Skala TPAD					Jumlah	Total
		1	2	3	4	5		
Sangat rendah (IPTIK<3.61)	Tingkat 1,0-3,99	4	1	0	0	0	5	23
	Tingkat 4,00-6,99	3	2	5	0	0	10	
	Tingkat 7,00-9,99	3	5	0	0	0	8	
Rendah (3.61<=IPTIK<3.97)	Tingkat 1,0-3,99	7	2	1	0	0	10	27
	Tingkat 4,00-6,99	7	6	2	1	0	16	
	Tingkat 7,00-9,99	0	1	0	0	0	1	
Sedang (3.97<=IPTIK<4.49)	Tingkat 1,0-3,99	7	2	0	0	2	11	44
	Tingkat 4,00-6,99	14	10	4	1	1	30	
	Tingkat 7,00-9,99	0	0	2	0	1	3	
Tinggi (IPTIK>=4.49)	Tingkat 1,0-3,99	5	0	0	1	1	7	246
	Tingkat 4,00-6,99	31	16	12	7	14	80	
	Tingkat 7,00-9,99	15	42	36	21	45	159	

Sumber: diolah Peneliti (2025)

Tabel 6 menunjukkan sejumlah 246 data yang memiliki tingkat pembangunan teknologi dan komunikasi yang tinggi 159 data diantaranya memiliki tingkat media coverage yang tinggi pula. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi Pembangunan TIK semakin memperkuat media coverage memengaruhi transparansi anggaran melalui website resmi pemerintah , dimana 60 data diantaranya termasuk dalam skala 5 telah mempublikasikan anggarannya melalui website pemerintah secara lengkap. (Krah & Mertens, 2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi sedang populer di kalangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori transformasi digital pada organisasi sektor publik pembanguna TIK yang terus meningkat akan mendorong meningkatnya pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan pula transparansi kepada publik(Mergel et al., 2019).

## Pengaruh Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Memoderasi Hubungan Pengaruh Tingkat Kesejahteraan (PDRB) Terhadap Transparansi Anggaran Berbasis Website Pemerintah Provinsi di Indonesia

Analisis pengaruh Tingkat Pembangunan TIK(Z) sebagai varibale moderasi dalam hubungan PDRB (X3) terhadap Transparansi Anggaran berbasis website pemerintah Provinsi di Indonesia (Y) menunjukkan koefisiensi sebesar -0,075 dengan p-value 0,378. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh Tingkat Kesejahteraan (PDRB) terhadap Transparansi Anggaran berbasis website pemerintah Provinsi di Indonesia.

Dari 340 data 246 data memiliki tingkat pmbangunan TIK yang tinggi. Dari 246 data yang memiliki TIK tinggi, terdapat 29 Data yang memiliki PDRB >1500Triliun , namun hanya 13 data yang memiliki tingkat transparansi anggran melalui website pada skala 5. Gambaran data perbandingan Pengaruh Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam memoderasi hubungan pengaruh Tingkat Kesejahteraan (PDRB) terhadap Transparansi Anggaran berbasis website pemerintah Provinsi di Indonesia disajikan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Distribusi Data Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komuniaksi dalam Memoderasi Tingkat Kesejahteraan (PDRB) terhadap Transparansi Anggaran berbasis website pemerintah Provinsi di Indonesia.**

Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi (IPTIK)	PDRB	Skala TPAD					Jumlah	Total
		1	2	3	4	5		
Sangat Rendah (IPTIK<3.61)	>20 T- 500 T	10	8	5	0	0	23	23
	>500 T-1000 T	0	0	0	0	0	0	
	>1000 T-1500 T	0	0	0	0	0	0	
	>1500 T	0	0	0	0	0	0	
Rendah (3.61<=IPTIK<3.97)	>20 T- 500 T	14	8	3	1	0	26	27
	>500 T-1000 T	0	1	0	0	0	1	
	>1000 T-1500 T	0	0	0	0	0	0	
	>1500 T	0	0	0	0	0	0	
Sedang (3.97<=IPTIK<4.49)	>20 T- 500 T	19	9	4	1	1	34	44
	>500 T-1000 T	2	3	0	0	1	6	
	>1000 T-1500 T	0	0	2	0	1	3	
	>1500 T	0	0	0	0	1	1	
Tinggi (IPTIK>=4.49)	>20 T- 500 T	49	45	34	16	28	172	246
	>500 T-1000 T	1	8	7	7	14	37	
	>1000 T-1500 T	0	0	1	2	5	8	
	>1500 T	1	5	6	4	13	29	

Sumber: Data Diolah (2025)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat mencerminkan kemampuan ekonomi dalam hal ini PDRB ,yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran serta tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi, termasuk informasi mengenai pengelolaan anggaran daerah. Namun, pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap transparansi anggaran digital tidak selalu sama pada setiap wilayah. Berdasarkan data yang dirangkum pada tabel 7 menggambarkan bahwa tingkat pembangunan TIK yang tinggi, tidak meningkatkan pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap Transparansi Anggaran berbasis website pemerintah Provinsi di Indonesia.

Meskipun sebuah provinsi memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, kondisi tersebut belum cukup untuk mendorong pemerintah daerah berperilaku lebih terbuka dalam menyediakan informasi anggaran. Hal ini sejalan dengan teori transformasi digital yang menyatakan bahwa teknologi hanyalah sarana pendukung. Transformasi digital menuntut kesiapan SDM, komitmen politik, budaya birokrasi yang terbuka, dan integrasi proses internal (Mergel et al., 2019). Dengan demikian, pembangunan TIK berfungsi sebagai pendukung, bukan penentu utama keberhasilan transparansi digital.

## E. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi transparansi anggaran berbasis website pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2014–2023. Temuan penelitian ini adalah tidak semua variabel mempunyai pengaruh yang sama terhadap transparansi digital. Media coverage terbukti menjadi faktor eksternal yang paling konsisten mendorong keterbukaan anggaran, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat juga terbukti memperkuat tuntutan publik terhadap transparansi. Sebaliknya, belanja daerah tidak menunjukkan pengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa besarnya anggaran tidak secara otomatis berbanding lurus dengan komitmen pemerintah dalam menyediakan informasi anggaran secara terbuka. Dalam konteks moderasi, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hanya memperkuat hubungan media coverage terhadap transparansi anggaran, tetapi tidak memperkuat hubungan belanja daerah dan kesejahteraan masyarakat terhadap transparansi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan teknologi yang dimiliki daerah belum tentu sejalan dengan komitmen birokrasi dalam mengimplementasikan transparansi. Meskipun banyak provinsi memiliki TIK yang baik, hal tersebut tidak serta-merta menghasilkan peningkatan keterbukaan informasi anggaran. Hal ini sejalan dengan teori transformasi digital yang menekankan bahwa perubahan berbasis teknologi hanya dapat berhasil jika diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya organisasi, dan integrasi tata kelola internal. Penelitian ini mempertegas bahwa transparansi anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi atau teknis, tetapi juga oleh dinamika institusional dan tekanan eksternal. Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen internal, meningkatkan literasi digital aparatur, serta memastikan bahwa infrastruktur TIK dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyediaan informasi publik yang lebih terbuka, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, A., & Ritonga, I. T. (2018). Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 13–26. <https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12558>
- Afryansyah, R. D. (2013). Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2, 1–11.
- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17(2), 100. <https://doi.org/10.20961/jab.v17i2.226>
- Astuti, A. D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Informasi keuangan Via Website (Studi empiris keuangan pada pemerintah daerah di Jawa Timur periode 2018). *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 9(2), 132–138.
- BPS. (2020). *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) 2019* (Vol. 12, Nomor 95). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/1750/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi--ip-tik--indonesia-tahun-2019>
- Chen, G., Kang, H., & Luna-Reyes, L. F. (2019). Key Determinants of Online Fiscal Transparency: A Technology-Organization-Environment Framework. *Public Performance and Management Review*, 42(3), 606–631. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1486213>
- Ciancarini, P., Giancarlo, R., & Grimaudo, G. (2024). Digital Transformation in the Public Administrations: A Guided Tour for Computer Scientists. *IEEE Access*, 12, 22841–22865. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3363075>
- Citro, F., Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2021). Explaining budget transparency

- through political factors. *International Review of Administrative Sciences*, 87(1), 115–134. <https://doi.org/10.1177/0020852319847511>
- García, A. C., & García-García, J. (2010). Determinants of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities. *Local Government Studies*, 36(5), 679–695. <https://doi.org/10.1080/03003930.2010.506980>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kasymova, J., Ferreira, M. A. M., & Piotrowski, S. J. (2016). Do Open Data Initiatives Promote and Sustain Transparency? A Comparative Analysis of Open Budget Portals in Developing Countries. *Public Administration and Information Technology*, 20(March), 137–155. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-25439-5\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-25439-5_7)
- Klun, M., Benčina, J., & Umek, L. (2019). Online Budget Transparency Index and its Determinants in Slovenian Municipalities. *Public finance Quarterly*, 64(3). [https://doi.org/10.35551/pfq\\_2019\\_3\\_5](https://doi.org/10.35551/pfq_2019_3_5)
- Krah, R. D. Y., & Mertens, G. (2020). Transparency in Local Governments: Patterns and Practices of Twenty-first Century. *State and Local Government Review*, 52(3), 200–213. <https://doi.org/10.1177/0160323X20970245>
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Mourao, P. R., Bronić, M., & Stanić, B. (2020). Discussing the determinants of online budget transparency based on a spatial regression analysis of Croatian cities and municipalities: Do good neighbours make you better? *International Area Studies Review*, 23(3). <https://doi.org/10.1177/2233865919895854>
- Mutmainnah, S., Nor, W., & Helmina, M. R. A. (2023). Determinan tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 191–199. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art22>
- Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *PKN STAN*, 1(6), 1–26.
- Nor, W., Safrida, L., Rizani, F., & Fitriaty, D. (2021). Transparansi Anggaran Pada Website Resmi Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(5).
- Ott, K., Bronić, M., Stanić, B., Klun, M., & Bencina, J. (2019). Determinants of Online Local Budget Transparency in Croatia and Slovenia. *Central European Public Administration Review*, 17(2), 167–188. <https://doi.org/10.17573/cepar.2019.2.08>
- Ott, K., Bronić, M., Stanić, B., Klun, M., & Benčina, J. (2019). Determinants of Online Local Budget Transparency in Croatia and Slovenia. *Central European Public Administration Review*, 17(2). <https://doi.org/10.17573/cepar.2019.2.08>
- Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 3(1), 12.
- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetensi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi Terhadap

- pengungkapan Informasi Keuangan dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. *Symposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- Rozi, F. (2018). *Determinan Pengungkapan Informasi Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Riau Dan Jambi)*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>
- Rukavina, I. (2023). Effects of Media Coverage on Budget Transparency in Croatian Local Administrative Units. *Naše gospodarstvo/Our economy*, 69(2), 15–28. <https://doi.org/10.2478/ngoe-2023-0008>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian* (6 Buku 2). Salemba empat.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management Article information. *Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56–92. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-19-01-2007-B003>
- Sutaryo, S., & Tri Amanu, K. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619>
- Syamsul. (2020). Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (TPKD) di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 185. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105>
- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas & Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 61. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).61-78](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).61-78)
- Zhang, Q., & Zheng, Y. (2017). Can media coverage improve the information disclosure quality of government final accounts? *China Journal of Accounting Studies*, 5(3), 294–325. <https://doi.org/10.1080/21697213.2017.1375629>